Lampiran B.04

PERLINDUNGAN SOSIAL PADA PEKERJA SEKTOR INFORMAL DI KABUPATEN SUMEDANG

Oleh :

Sakroni, S.ST, M.Pd
Drs. M. Ilyas, M.Ag, MPS.Sp
Edi Suharto, Ph.D
Drs. Ramli A. Rahman, M.Pd

SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL
Jl. Ir.H. Juanda No.367 Telp.(022)2504838 Fax.2502962 Bandung
2011

ABSTRAK

Sakroni, M. Ilyas, Edi Suharto, Ramli. 2011. **Perlindungan Sosial Pada Pekerja Sektor Informal di Kabupaten Sumedang.**

Salah satu kewajiban negara adalah memberikan perlindungan sosial bagi warga negaranya. Perlindungan sosial di Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan hidup layak bagi setiap penduduknya secara berkelanjutan, sehingga dapat terwujud kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Perlindungan sosial esensinya merupakan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomis aatau seseorang atau kelompok yang rentan terhadap resiko. Salah satu kelompok yang rentan terhadap resiko adalah para pekerja sektor informal. Di Kabupaten Sumedang telah menyelenggarakan perlindungan sosial dalam bidang kesehatan yakni pelayanan kesehatan gratis, tapi masih terbatas pada pelayanan kesehatan dasar, bagaimana dengan perlindungan sosial dalam bidang yang lain yang bisa memenuhi kebutuhan para pekerja sektor informal.

Pokok permasalahan penelitiannya adalah bagaimana Perlindungan Sosial Pada sektor Informal di Kabupaten Sumedang? Sub-sub masalah penelitiannya, yakni: Bagaimana resiko yang dihadapi? Bagaimana kebutuhan-kebutuhan Pekerja sektor informal terhadap perlindungan sosial? Perlindungan sosial yang telah ada? Bagaimana kekurangan program perlindungan sosial yang sudah ada? Dan apa harapan pekerja sektor informal terhadap perlindungan sosial?

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Tehnik pengumpulan datanya adalah: Wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi. Tehnik pemeriksaan keabsahan data melalui: ketekunan pengamatan dan triangulasi. Langkah-langkah analisa data: reduksi data, kategorisasi dan penapsiran data.

Hasil penelitian telah memberikan penjelasan tentang data sebagai berikut: pekrja sektor informall sangat rentan terhadap terjadinya resiko, baik resiko ekonomi dengan berhentinya bekerja atau PHK dan penertiban tempat bekerja sehingga berhenti bekerja, rentan terjadinya kecelakaan dan sakit, menghadapi hari tua hingga kematian. Perlindungan sosial yang dibutuhkan para pekerja sektor informal adalah bidang kepastian bekerja, bidang kesehatan, kecelakaan, menghadapi hari tua dan kematian. Perlindungan sosial yang telah ada bidang pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah,Bidang kesehatan adalah Jamkesmas dan Pelayanan Kesehatan Daerah, bidang pangan adalah Beras untuk orang miskin (Raskin). Kekurangan dari perlindungan sosial yang telah ada bahwa Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Daerah Sumedang hanya memberikan pelayanan kesehatan dasar saja belum mampu memberikan pelayanan kesehatan lanjutan atau rujukan pada dokter spesialis, beras untuk orang miskin kualitasnya suka jelek dan kuantitasnya tidak memenuhi kebutuhan, Perlindungan sosial yang diharapkan adalah perlindungan kesehatan yang menyeluruh, kepastian untuk bekerja, perlindungan sosial kecelakaan, kematian, jaminan hari tua dan perlindungaan sosial kematian.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan kekuatan, kemampuan dan ridho-Nya, berkat rahmat dan bingbingan-Nyalah penelitian Pusat Kajian Pembangunan dan Kebijakan Sosial ini dapat kami selesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada junjunan kita Nabi Muhammad SAW.

Tulisan ini bermaksud menjelaskan secara deskriptif tentang Perlindungan Sosial Pada Pekerja Sektor informal khususnya di Kabupaten Sumedang terdiri dari : Resiko yang dihadapi para pekerja sektor informal, Perlindungan sosial yang sudah ada, kelemahan dan kekurangan perlindungan sosial yang ada dan harapan pekerja sektor informal terhadap perlindungan Sosial. *Semoga tulisan ini bermanfaat untuk pengembangan pemahaman* tentang perlindungan sosial pada pekerja sektor informal dan sebagai bahan masukan bagi para pemegang kebijakan dalam pelaksanaan perlindungan sosial, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun pihak swasta.

Kami sadar dalam penelitian ini terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan, keritikan dan saran demi perbaikan. Penelitian ini terlaksaana berkat bantuan dari beberapa pihak, oleh karena saya sampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. Wawan Heryana, M.Pd. selaku ketua Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) yang telah memberikan dukungan kesempatan untuk mengikuti kegiatan penelitian.
2. Bapak Drs. Tukino, M.Si. selaku Kepala Lembaga Penelitian Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) yang telah memberikan kesempatan kepada para peneliti untuk terlibat melakukan penelitian pada tahun 2011.
3. Bapak DR. Aep Rusmana, M.Si selaku Ketua Pusat Kajian Pembangunan dan Kebijakan Sosial (PUSKA-PKS) Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) yang memberikan dukungan dan kesempatan sebagai tim penelitian pada tahun 2011.

Semoga segala bantuan dukungan dan kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti dari semua pihak mendapat balasan yang lebih baik dari Tuhan Yang Esa, Allah Subhana Huwa Ta,aala. Amin.

Bandung, September 2011

Tim Peneliti

PUSKA PKS

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Masalah Penelitian 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kegunaan Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Jaminan Sosial 8
B. Tinjauan Perlindungan Sosial 12
C. Sektor Informal 17

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian 18
B. Deskripsi Latar Penelitian 19
C. Sumber Data 20
D. Tehnik Pengumpulan Data 21
E. Tehnik Pemeriksaan Keabsahan Data 23
F. Rancangan Analisis Data 26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 28
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 41

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 56
B. Saran 58

DAFTAR PUSTAKA 60

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kewajiban negara adalah memberikan perlindungan sosial bagi warga negaranya. Hal ini dikarenakan situasi yang tidak selalu bisa diprediksi di dalam masyarakat, baik yang dikarenakan oleh bencana alam, krisis maupun penyakit dan masyarakat mempunyai kemampuan berbeda-beda dalam menghadapi situasi demikian. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk tanggap dan memberikan perlindungan sosial agar masyarakat dapat bangkit dan keluar dari situasi tersebut, maka wajar bila di hampir seluruh negara yang menganut sistem negara kesejahteraan (*welfare state*), kesadaran untuk memberikan perlindungan sosial justru muncul ketika sebagian besar warga negara tersebut berada pada kondisi yang buruk.

Pada dasarnya bentuk dan mekanisme perlindungan sosial di berbagai negara berbeda-beda karena adanya penyesuaian dengan kondisi sosial dan politik di negaranya masing-masing. Seperti di Swedia, Norwegia, Denmark maupun Finlandia, jaminan sosial diberikan oleh negara secara merata kepada seluruh penduduknya, baik kaya maupun miskin dan negara sebagai pembayar tunggal (*sole payer*) berbeda dengan Jerman dan Austria yang memberikan jaminan sosial dengan melibatkan dunia usaha. Berbeda pula halnya AS, Inggris, Australia dan Selandia Baru yang memberikan

jaminan sosial terutama kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*).

Perlindungan sosial di Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan hidup layak bagi setiap penduduknya, secara berkelanjutan sehingga dapat terwujud kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia secara berkeadilan, dengan bertumpu kepada prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan jaminan sosial yaitu penyertaannya bersifat wajib bagi seluruh rakyat, kegotong-royongan, memberikan perlindungan yang adil pada para peserta, peserta membayar iuran, *law of the large numbers* atau hukum bilangan besar, transparan dan dapat dipercaya. Penyelenggaraannya bersifat nirlaba (*not – profit*) dan bila ada peningkatan asset akan digunakan untuk menambah manfaat bagi peserta. Kelembagaan ini harus di bentuk sebagai suatu sistem yang integral, terkoordinasi dan dapat menghindari terjadinya tumpang tindih sebagaimana yang terjadi pada program jaminan sosial yang ada saat ini dalam masyarakat. Oleh karenanya kelembagaan yang akan dibangun adalah kelembagaan yang independen menerapkan *good governance* dan dapat dipercaya untuk mewakili kepentingan para stakeholder yaitu peserta, pemberi kerja dan pemerintah. Kelembagaan dimaksud merupakan lembaga yang mengandung sifat dasar sebagai perwalian amanah. Dalam pelaksanaanya, lembaga tersebut senantiasa harus berpedoman pada undang-undang dan ketentuan peraturan untuk itu, termasuk di dalamnya harus diatur tentang perlindungan sosial bagi sektor informal.

Sektor informal merupakan kegiatan-kegiatan sektor informal yang beroprasi di tempat-tempat umum di sekitar sentra-sentra bisnis. Kegiatan ini memiliki resiko dan permasalahan tersendiri, baik siklus kehidupan, dampak krisis ekonomi, perubahan lingkungan, dan tata pemerintahan serta bencana alam dan sosial. Dari siklus kehidupan, orang-orang yang bekerja pada sektor informal tidak bisa menghindari dari terjadinya kecelakaan, kecacatan, hari tua dan kematian. Resiko dari segi ekonomi, para pekerja sektor informal akan mengahadapi resiko tidak bisa bekerja, tidak memperoleh pekerjaan, pemutusan hubungan kerja (PHK) , pendapatan rendah sedangkan harga kebutuhan pokok naik, terlebih-lebih jika dilanda krisis ekonomi. Dari segi resiko lingkungan, yakni para pekerja sektor informal tidak bisa menghindari terjadinya bencana banjir, longsor, kekeringan, kebakaran dan gempa bumi. Dari segi resiko akibat adanya pengaturan tata kelola dari pemerintah yang berakibat pada adanya penertiban dan penggusuran, ketidaksetabilan politik dan kerusuhan sosial, yang mengakibatkan para pekerja sektor informal menghadapi resiko yang sangat berat. Namun sampai sekarang belum ada skema perlindungan sosial yang bisa memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi para pekerja sektor informal .

Keberadaan dan kelangsungan kegiatan sektor informal dalam sistem ekonomi kotemporer bukanlah gejala negatif, namun lebih sebagai realitas ekonomi kerakyatan yang berperan cukup penting dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan nasional. Setidaknya, ketika program

pembangunan kurang mampu menyediakan peluang kerja bagi angkatan kerja, sektor informal dengan segala kekurangannya mampu berperan sebagai penampung dan alternatif peluang kerja bagi para pencari kerja.

Gelombang ketidakpuasan kaum miskin dan para penganggur terhadap ketidakmampuan pembangunan menyediakan peluang kerja, untuk sementara dapat diredam lantaran tersedia peluang kerja di sektor informal. Begitupun ketika kebijakan pembangunan cenderung menguntungkan usaha skala besar, sektor informal kendati tanpa dukungan fasilitas sepenuhnya dari negara, dapat memberikan subsidi sebagai penyedia barang dan jasa murah untuk mendukung kelangsungan hidup para pekerja usaha skala besar. Bahkan, tatkala perekonomian nasional mengalami kemunduran akibat resesi, sektor informal mampu bertahan tanpa membebani ekonomi nasional, sehingga roda perekonomian masyarakat tetap bertahan. Peran sektor informal ini telah berlangsung sejak lama dalam pasang surut perkembangan masyarakat dan dinamika

perkembangan ekonomi. Sampai saat ini, pengertian sektor informal sering dikaitkan dengan ciri-ciri utama pengusaha dan pelaku sektor informal, antara lain: kegiatan usaha bermodal utama pada kemandirian rakyat, memanfaatkan teknologi sederhana, pekerjanya terutama berasal dari tenaga kerja keluarga tanpa upah, bahan baku usaha kebanyakan memanfaatkan sumber daya lokal, sebagian besar melayani kebutuhan rakyat kelas menengah ke bawah, pendidikan dan kualitas sumber daya pelaku tergolong

rendah. Sektor informal masih cukup dominan menyerap angkatan kerja khususnya di perkotaan. Selain itu perkembangan ekonomi belum dapat mengatasi persoalan klasik keterbatasan peluang kerja.

Di satu segi sektor informal masih memegang peranan penting menampung angkatan kerja, terutama angkatan kerja muda yang masih belum berpengalaman atau angkatan kerja yang pertama kali masuk pasar kerja. Keadaan ini dapat mempunyai dampak positif mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Tetapi di segi lain menunjukkan gejala tingkat produktivitas yang rendah, karena masih menggunakan alat-alat tradisional dengan tingkat pendidikan serta keterampilan yang relatif rendah. Mengingat peran sektor informal yang cukup positif dalam proses pembangunan, sudah sewajarnya nasib para pekerjanya dipikirkan. Beberapa kebijakan, baik langsung maupun tidak, untuk membantu pengembangan masyarakat melalui pembinaan kegiatan usaha pekerja di sektor informal memang sudah dilakukan. Namun ada kecenderungan kegiatan ekonomi di sektor informal dan nasib pekerja sektor informal belum banyak mengalami perubahan. Tanpa bermaksud mengurangi arti pentingnya kebijakan yang telah ada, kebijakan yang biasa diberikan kepada pengusaha besar mungkin dapat dikurangi, kemudian prioritas diberikan pada kegiatan sektor informal dan memihak pada kepentingan masyarakat.

Sumedang adalah salah satu Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten dari Provinsi Jawa Barat, di satu sisi pemerintah ini telah menyelenggarakan

Jaminan Kesehatan bagi warganya tetapi masih terbatas dan di sisi lain terdapat pekerja-pekerja yang bekerja di sektor informal seperti pedagang asongan yang naik-turun bis, pedangang bakso, penarik becak, tukang ojeg dan pedagang kaki lima terutama di ibu kota Sumedang, yang rentan menghadapi resiko. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, studi ini berusaha memaparkan perlindungan sosial pekerja di sektor informal khususnya di kota Sumedang.

B. Masalah Penelitian

Dari latar belakang tersebut peneliti, maka masalah pokoknya adalah "Bagaimana Perlindungan Pada Sektor Informal di Kabupaten Sumedang? Dari pokok permasalahan itu, kami urai dengan beberapa sub masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana resiko-resiko yang di hadapi para pekerja sektor informal?
2. Bagaimana kebutuhan-kebutuhan perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal?
3. Bagaimana perlindungan sosial yang sudah ada di sumedang?
4. Bagaimana kekurangan program perlindungan sosial?
5. Apa harapan pekerja sektor informal terhadap perlindungan sosial yang diberikan pemerintah?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui data tentang:

1. Untuk mengetahui resiko-resiko yang dihadapi para pekerja sektor informal
2. Untuk mengambarkan kebutuhan-kebutuhan perlindungan sosial pekerja sektor informal
3. Untuk mengetahui perlindungan sosial yang sudah ada
4. Untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan perlindungan sosial
5. Untuk menggambarkan harapan-harapan pekerja sektor informal terhadap perlindungan sosial yang diberikan pemerintah setempat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini berharap sebagai media pengembangan pengetahuan bagi para peneliti tentang perlindungan sosial bagi para pekerja sektor informal.
2. Secara Praktis sebagai bahan masukan guna bermanfaat dalam pengentasan permasalahan sosial bagi para praktisi dan pengambilan kebijakan dalam perlindungan sosial.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Jaminan Sosial

Sistem Jaminan Sosial Nasional (*national social security system*) adalah sistem penyelenggaraan program negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial, agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Jaminan sosial diperlukan apabila terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan seseorang, baik karena memasuki usia lanjut atau pensiun, maupun karena gangguan kesehatan, cacat, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya.

Sistem Jaminan Sosial Nasional disusun dengan mengacu pada penyelenggaraan jaminan sosial yang berlaku universal dan telah diselenggarakan oleh negara-negara maju dan berkembang sejak lama. Penyelenggaraan jaminan sosial di berbagai negara memang tidak seragam, ada yang berlaku secara nasional untuk seluruh penduduk dan ada yang hanya mencakup penduduk tertentu untuk program tertentu. Secara universal, pengertian jaminan sosial dapat dijabarkan seperti beberapa definisi yang dikutip berikut ini.

Menurut Guy Standing (2000)

Social security,is a system for providing income security to deal with the contingency risks of life – "sickness, maternity, employment injury, unemployment, invalidity, old age and death; the provision of medical care, and the provision of subsidies for families with children".

ILO Convention 102

Social security is the protection which society provides for its members through a series of public measures: to offset the absence or substantial reduction of income from work resulting from various contingencies (notably sickness, maternity, employment injury, unemployment, invalidity, old age and death of the breadwinner); to provide people with health care; and ; to provide benefits for families with children."

Tanpa merinci jenis program jaminan sosial lainnya, UUD 1945 telah mengamanatkan kepada Negara untuk mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Pasal 28 H ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa jaminan sosial adalah hak *setiap* warga negara. Lebih lanjut, perlunya segera dikembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) ditegaskan pada Pasal 34 ayat 2 Perubahan UUD 45 tahun 2002 yang menyatakan bahwa —*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*l. Tanpa rincian program jaminan sosial yang akan dikembangkan, dapat dipahami bahwa amanat tersebut menghendaki terselenggaranya berbagai program jaminan sosial *secara komprehensif/menyeluruh* seperti yang telah diselenggarakan negara lain, meskipun hal itu dilakukan secara bertahap.

Secara universal, Jaminan Sosial dijamin oleh Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia

meratifikasi deklarasi tersebut yang di dalamnya dinyatakan bahwa — .... setiap orang, sebagai anggota masyarakat, mempunyai hak atas jaminan sosial ..... dalam hal menganggur, sakit, cacat, tidak mampu bekerja, menjanda, hari tua ..... Konvensi ILO No. 102 tahun 1952 menganjurkan agar semua negara di dunia memberi perlindungan dasar kepada setiap warga negaranya dalam rangka memenuhi Deklarasi PBB tentang Hak Jaminan Sosial.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa, selain dapat memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat, jaminan sosial juga menjadi penggerak pembangunan ekonomi. Akhir-akhir ini bermunculan kenyataan baru yang membuktikan bahwa jaminan sosial makin diperlukan mengingat bahwa kondisi perekonomian global maupun nasional sedang mengalami berbagai krisis yang mengancam kesejahteraan rakyat. Krisis telah mengakibatkan masyarakat kehilangan pekerjaan, berkurangnya pendapatan, dan kehilangan kesejahteraan yang menjadi haknya. Disamping itu, pendapatan masyarakat akan berkurang karena menderita penyakit atau memasuki usia lanjut. Jaminan sosial dapat diandalkan sebagai upaya penyelamat dari berbagai risiko tersebut.

Jaminan sosial dapat diwujudkan melalui mekanisme asuransi sosial dan tabungan sosial. Adanya perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi melalui asuransi sosial dapat mengurangi beban negara (APBN) dalam penyediaan dana bantuan sosial yang memang sangat terbatas. Melalui

prinsip kegotong-royongan, mekanisme asuransi sosial merupakan sebuah instrumen negara yang kuat dan digunakan hampir seluruh negara maju dalam menanggulangi risiko sosial ekonomi yang setiap saat dapat terjadi pada setiap warga negaranya.

Dari aspek ekonomi makro, jaminan sosial nasional adalah suatu instrumen yang efektif untuk memobilisasi dana masyarakat dalam jumlah besar, yang sangat bermanfaat untuk membiayai program pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Selain memberikan perlindungan melalui mekanisme asuransi sosial, dana jaminan sosial yang terkumpul dapat menjadi sumber dana investasi yang memiliki daya ungkit besar bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Dilihat dari aspek dana, program ini merupakan suatu gerakan tabungan nasional *yang* berlandaskan prinsip solidaritas sosial dan kegotong-royongan.

Michael von Hauff dalam "*The Relevance of Social Security for Economic Development*" mengutip kesepakatan dari the World Summit for Social Development di Kopenhagen tahun 1995, bahwa sistem jaminan sosial merupakan komponen esensial dari perluasan pembangunan sosial dan dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Lebih rinci, deklarasi summit tersebut antara lain mencanangkan "*to develop and implement policies which ensure that all persons enjoy adequate economic and social protection in the event of unemployment, sickness, during motherhood and child-rearing, in the event of widowhood, disability and in old age.*"

Selain untuk penanggulangan kemiskinan, jaminan sosial juga berfungsi sebagai perlindungan bagi individual dalam menghadapi kondisi kehidupan yang semakin memburuk yang tidak dapat ditanggulangi oleh mereka sendiri (von Hauff dan de Haan; 1997).

Barrietos dan Shepherd (2003) menjelaskan bahwa jaminan sosial lebih sempit dibandingkan perlindungan sosial. Jaminan sosial umumnya dihubungkan dengan hal-hal yang menyangkut kompensasi dan program kesejahteraan yang lebih bersifat *'statutory schemes'*. Adapun bentuk jaminan sosial yang sudah diselenggarakan adalah asuransi sosial yang mencakup asuransi kesehatan (Askes dan Asabri), asuransi kesejahteraan sosial (Askesos), tabungan pensiun (Taspen), jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek); kebijakan ketenagakerjaan seperti cuti hamil, cuti haid, tunjangan sakit/kecelakaan yang dibayarkan oleh perusahaan, dll.

B. Tinjauan Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial esensinya merupakan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi. Adanya perlindungan sosial ini menjadi stimulan bagi mereka untuk bisa bangkit, berkarya dan mandiri. Edi Suharto (2009:42) menyebutkan setidaknya ada tiga tujuan utama perlindungan sosial. Pertama, mencegah dan mengurangi resiko yang dialami manusia sehingga terhindar dari kesengsaraan yang parah dan berkepanjangan. Kedua, meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan, kesengsaraan dan

ketidaknyamanan sosial ekonomi. Ketiga, memungkinkan kelompok-kelompok miskin untuk memiliki standar hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk terdapat *tiga-pilar pendekatan* yang saling melengkapi namun berbeda pola penyelenggara-annya, yaitu :

Pilar Pertama menggunakan meknisme bantuan sosial (*social assistance*) kepada penduduk yang kurang mampu, baik dalam bentuk bantuan uang tunai maupun pelayanan tertentu, untuk memenuhi *kebutuhan dasar yang layak*. Pembiayaan bantuan sosial dapat bersumber dari Anggaran Negara dan atau dari Masyarakat. bantuan sosial biasanya diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu masyarakat yang benar-benar membutuhkan, umpamanya penduduk miskin, sakit, lanjut usia, atau ketika terpaksa menganggur. Di Indonesia, bantuan sosial oleh Pemerintah kini lebih ditekankan pada pemberdayaan dalam bentuk bimbingan, rehabilitasi dan pemberdayaan yang bermuara pada kemandirian PMKS. Diharapkan setelah mandiri mereka mampu membayar iuran untuk masuk mekanisme asuransi. Kearifan lokal dalam masyarakat juga telah lama dikenal yaitu upaya-upaya kelompok masyarakat, baik secara mandiri, swadaya, maupun gotong royong, untuk memenuhi kesejahteraan anggotanya melalui berbagai upaya bantuan sosial, usaha bersama, arisan, dan sebagainya. Kearifan lokal akan tetap tumbuh sebagai upaya tambahan

sistem jaminan sosial karena kearifan lokal tidak mampu menjadi sistem yang kuat, mencakup rakyat banyak, dan tidak terjamin kesinambungannya. Pemerintah mendorong tumbuhnya swadaya masyarakat guna memenuhi kesejahteraannya dengan menumbuhkan iklim yang baik dan berkembang, antara lain dengan memberi insentif untuk dapat diintegrasikan dalam sistem jaminan sosial nasional.

Pilar Kedua menggunakan mekanisme asuransi sosial atau tabungan sosial yang bersifat wajib atau *compulsory insurance*, yang dibiayai dari kontribusi atau iuran yang dibayarkan oleh peserta. Dengan kewajiban menjadi peserta, sistem ini dapat terselenggara secara luas bagi seluruh rakyat dan terjamin kesinambungannya dan profesionalisme penyelenggaraannya. Dalam hal peserta adalah tenaga kerja di sektor formal, iuran dibayarkan oleh setiap tenaga kerja atau pemberi kerja atau secara bersama-sama sebesar prosentase tertentu dari upah. Mekanisme asuransi sosial merupakan tulang punggung pendanaan jaminan sosial di hampir semua negara. Mekanisme ini merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal penduduk dengan mengikut-sertakan mereka secara aktif melalui pembayaran iuran. Besar iuran dikaitkan dengan tingkat pendapatan atau upah masyarakat (biasanya prosentase tertentu yang tidak memberatkan peserta) untuk menjamin bahwa semua peserta mampu mengiur.

Kepesertaan wajib merupakan solusi dari ketidak-mampuan penduduk melihat risiko masa depan dan ketidak-disiplinan penduduk menabung untuk masa depan. Dengan demikian sistem jaminan sosial juga mendidik masyarakat untuk merencanakan masa depan. Karena sifat kepesertaan yang wajib, pengelolaan dana jaminan sosial dilakukan sebesar-besarnya untuk meningkatkan perlindungan sosial ekonomi bagi peserta. Karena sifatnya yang wajib, maka jaminan sosial ini harus diatur oleh UU tersendiri. Di berbagai negara yang telah menerapkan sistem jaminan sosial dengan baik, perluasan cakupan peserta dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat dan pemerintah serta kesiapan penyelenggaraannya. Tahapan biasanya dimulai dari tenaga kerja di sektor formal (tenaga kerja yang mengikatkan diri dalam hubungan kerja), selanjutnya diperluas kepada tenaga kerja di sektor informal, untuk kemudian mencapai tahapan cakupan seluruh penduduk. Upaya penyelenggaraan jaminan sosial sekaligus kepada seluruh penduduk akan berakhir pada kegagalan karena kemampuan pendanaan dan manajemen memerlukan akumulasi kemampuan dan pengalaman. Kelompok penduduk yang selama ini hanya menerima bantuan sosial, umumnya penduduk miskin, dapat menjadi peserta program jaminan sosial, dimana sebagian atau seluruh iuran bagi dirinya dibayarkan oleh pemerintah. Secara bertahap bantuan ini dikurangi untuk menurunkan ketergantungan kepada bantuan pemerintah. Untuk itu pemerintah perlu memperhatikan perluasan

kesempatan kerja dalam rangka mengurangi bantuan pemerintah membiayai iuran bagi penduduk yang tidak mampu.

Pilar Ketiga menggunakan mekanisme asuransi sukarela (*voluntary insurance*) atau mekanisme tabungan sukarela yang iurannya atau preminya dibayar oleh peserta (atau bersama pemberi kerja) sesuai dengan tingkat risikonya dan keinginannya. Pilar ketiga ini adalah jenis asuransi yang sifatnya komersial, dan sebagai tambahan setelah yang bersangkutan menjadi peserta asuransi sosial. Penyelenggaraan asuransi sukarela dikelola secara komersial dan diatur dengan UU Asuransi.

Selanjutnya, definisi tentang *Social Insurance Programs* menurut Folland, Goodman, dan Stano (1997: *Social Insurance Programs*) dapat dibedakan ke dalam lima kategori yaitu:

a. ***Poverty*** *– programs that are directed toward persons experiencing poverty involve either the provision of cash, or more often the subsidized provisions of goods "in kind," such as rent vouchers or food stamps.*

b. ***Old Age*** *- programs that are directed toward the elderly include income maintenance, such as Social Security, as well as services and considerations (such as old-age housing, Meals-on-Wheels) that may address the generally decreased mobility of the elderly.*

c. ***Disability*** *– programs that generally provide cash benefits.*

d. ***Health*** *– programs that cover illness or well-care financing and/or provide facilities for various segments of population. The individual's health care is financed either entirely or in part by the government.*

e. ***Unemployment*** *– programs that generally provide short-term cash benefits.*

Dari uraian di atas, semakin menegaskan bahwa perlindungan dan jaminan sosial sangat terkait erat dengan masalah kemiskinan, yang

selanjutnya berdampak pula pada penurunan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Untuk itu, guna mendukung upaya pemerintah dalam memberikan/menciptakan perlindungan dan jaminan sosial yang lebih utuh kepada setiap warga negaranya, maka pemerintah perlu menataulang berbagai bentuk perlindungan dan jaminan sosial yang sudah ada, dan membuatnya menjadi suatu Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial (SPJS) yang lebih utuh dan memberikan efisiensi dan efektivitas yang lebih optimal

C. Sektor Informal

Sektor informal disebut juga sebagai kegiatan ekonomi informal, kegiatan yang tidak terkena peraturan *(unregulated economy)* sektor yang tidak terorganisasi *(unorganized sector)* atau pekerjaan yang tidak teramati *(unobsrrved empoyment)*. Secara khas, sektor ini berhubungan dengan unit-unit ekonomi dan pekerja-pekerja dalam berbagai kegiatan perdagangan dan pekerjaan-pekerjaan yang beroperasi di luar pekerjaan formal. Kegiatan-kegiatan ini menggunakan organisasi, teknologi dan struktur yang sederhana sehingga disebut informal. Sektor ini juga lebih banyak mengandalkan tenaga kerja yang ada dalam keluarga dan sebagian kecil mengupah pekerja yang tingkat ekonominya rendah, demikian pula modal manusianya (SDM), serta atas dasar pekerjaan yang tidak tersetandar secara hukum. (Suharto,2002)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, pendekatan ini dipakai dengan dilandasi tujuan penelitian yaitu untuk memahami secara mendalam tentang bagaimana perlindungan sosial bagi sektor informal di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

Taylor dalam Lexy J. Moleong (2006:4), menyatakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara lengkap dan mendetail mengenai perlindungan soail bagi sektor informal. Mennurut Sugiyono (2008:205) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Tekhnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat Induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dalam hal ini adalah pendekatan

Sedangkan latar tertutup adalah peneliti membangun jalinan komunikasi yang positif dengan para pekerja di sektor informal, supaya data yang ingin diperoleh dapat dikumpulkan dengan baik.

C. Sumber Data

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sample dari informan adalah *Purposive Sampling* (pengambilan sample berdasarkan tujuan penelitian), Sugiyono (2008:53-54) dalam buku Memahami Penelitian Kualitatif mengatakan bahwa :

> "*Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti".

Teknik ini dipilih peneliti sebagai teknik pengambilan sample agar dapat memperoleh data yang lebih akurat dan lengkap sesuai dengan permasalahan penelitian sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Sumber data dalam penelitian ini adalah : Data primer yaitu data yang didapat secara langsung melalui wawancara langsung dengan informan dalam hal ini adalah pekerja sektor informal, organisasi atau serikat pekerja terdiri dari 5 orang. Data sekunder yaitu data pendukung dari data primer yang sudah diperoleh terlebih dahulu. Sumber data pendukung ini meliputi Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara mendalam (*Indepth Interview*)

Wawancara dilakukan secara langsung atau bertatap muka dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada informan yang berpedoman kepada skenario yang telah dibuat dan bersifat fleksibel. Wawancara dilakukan untuk mengetahui secara mendalam mengenai perlindungan sosial pada sektor informal . Alat Bantu yang digunakan dalam proses wawancara adalah pedoman penelitian yang telah disusun oleh peneliti sebelum ke lokasi penelitian. Ruang lingkup data dari penelitian ini adalah tentang : karakteristik informan,, resiko yanga dihadapi pekerja sektor informal, skema perlindungan sosial yang dibutuhkan, perlindungan sosial yang te;ah ada, kelemahan-kelemahan skema perlindungan tata cara pekerja sektor informal memperoleh perlindungan sosial serta harapan terhadap perlindungan sosial.

Keterbatasan dalam teknik ini adalah informan terkadang sulit untuk memahami pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Upaya untuk mengatasi permasalahn tersebut peneliti selalu menggunakan bahasa yang mudah, dimengerti oleh informan dan juga digunakan tehnik pengumpulan data yang lain..

2. Teknik Observasi

Dalam observasi, peneliti melakukan pengumpulan data dan informasi dalam melakukan pengamatan langsung. Yang dilakukan adalah observasi partisipatif, dimana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan dan ikut merasakan suka dukanya, kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari berselang dan ditambah juga dengan peneliti sering berkomunikasi dengan informan. Dengan observasi partisipatif ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, yaitu data yang berkaitan dengan:

a. Kondisi kehidupan Informan, dan
b. Kegiatan di Sektor Informal

3. Teknik studi dokumentasi

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mencatat data-data karakteristik informan, geografis, demografis, sosiografis, dan perlindungan sosial yang terdapat di Kabupaten Sumedang, kelemahan dari perlindungan sosial yang sudah ada serta harapan informan terhadap perlindungan sosial. Studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mempelajari beberapa tulisan yang berkaitan dengan geografis, demografi lokasi penelitian dan data-data lainnya yang dirasa

perlu. Dalam pelaksanaannya peneliti tidak mengalami hambatan karena peneliti memberitahukan kepada sumber data sedang melakukan penelitian dengan menunjukkan surat ijin penelitian dari Pemerintah Kabupaten Sumedang, sehingga sumber data tidak merasa keberatan apabila dokumen, arsip atau laporan yang berkaitan dengan penelitian diberikan kepada peneliti. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi dokumentasi adalah :

a. Kondisi geografis dan demografi Kabupaten Sumedang.

c. Dokumen, arsip atau data-data kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan sosial.

E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh peneliti, maka teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan antara lain :

1. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interprestasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara terinci. Dengan kata lain, perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan pengalaman.

Hal ini berarti, peneliti mengadakan pengamatan dengan teliti secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol (Moleong, 2006 : 329-330), untuk menguji kredibilitas atas data yang akan dikumpulkan selama di lapangan.

2. Triangulasi

Menurut Moleong (2006:178) "triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau informasi yang diperoleh melalui perpanjangan waktu yang berada dalam metode kualitatif". Teknik ini berarti memanfaatkan data/sumber lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu. Pembandingan ini dilakukan dengan cara membandingkan data dari beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan dan atau membandingkan data dari beberapa informan yaitu antara informan utama dan informan pendukung.

Tahap-tahap dalam teknik triangulasi yang bisa dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat, dengan cara:

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, yaitu dengan membandingkan apa yang disampaikan informan pada saat melakukan kegiatan sehari-hari dengan apa yang disampaikan secara informan pada saat wawancara. Misalkan, membandingkan

antara hasil wawancara dengan beberapa informan dengan kegiatan di sektor informal.

b. Membandingkan apa yang dikatakan informan didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi. Misalkan, membandingkan hasil wawancara yang dilakukan secara bersama-sama dengan beberapa informan dengan hasil wawancara yang dilakukan secara pribadi dengan masing-masing individu.

c. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, atau orang yang berpendidikan menengah atau tinggi dan orang pemerintahan. Misalkan, membandingkan hasil wawancara dengan pekerja sektor informal dengan hasil wawancara dari pengurus organisasi.

3. Kecukupan referensial

Pengujian data yang dilakukan dengan menggunakan bahan referensi, seperti menggunakan dan mengambil gambar dengan kamera sebagai bukti. Selain itu, rekaman dan catatan dapat digunakan sebagai patokan untuk menguji pada waktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan mengenai referensi atau data baik berupa hasil catatan mengenai hasil wawancara serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang dapat digunakan pada waktu analisis data.

E. Rancangan Analisis Data

Analisis data pada hakekatnya adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikan data dengan tujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantsif (Lexy J Moleong, 2006:103). Urutan langkah dalam analisis data sebagai berikut :

1. Reduksi data

   Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan belum tersusun. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan analisa data.

   Dalam penelitian mengenai perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal terhadap pelayanan sosial di Kabupaten Sumedang ini mereduksi data, data-data yang direduksi itu yaitu data-data hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi perlu dipilih-pilih mana yang termasuk kedalam sub problematik dan mengabaikan data yang tidak sesuai dengan sub problematik.

2. Kategorisasi

Setelah data direduksi, maka peneliti berupaya mengelompokkan satuan-satuan analisis ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki karakter yang sama. Pengkategorisasian ini menggambarkan karakteristik khusus informan.

3. Penafsiran data

Peneliti menafsirkan data yang telah direduksi dan dikategorisasikan tersebut. Penafsiran harus sesuai dengan apa yang ada di latar penelitian, selanjutnya ditarik kesimpulan.

Sedangkan teknik yang digunakan dalam analisis data adalah sebagai berikut :

a. Transkrip, yaitu memindahkan data yang diperoleh dalam bentuk catatan-catatan dengan cek dan recek sesuai hasil wawancara.
b. Analisis individu, yaitu membandingkan transkrip individu dengan yang lainnya.
c. Thema, yaitu mencari persamaan dan perbedaan transkrip individu dan digeneralisasikan untuk mengembangkan pola interpretasinya.
d. Kontrol, yaitu dilakukan dengan cara menyesuaikan analisis data yang diproses dengan catatan atau hasil rekaman.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Sumedang terletak antara 6°44'-70°83' Lintang Selatan dan 107°21'-108°21' Bujur Timur, dengan Luas Wilayah 152.220 Ha yang terdiri dari 26 kecamatan dengan 272 desa dan 7 kelurahan. Kabupaten Sumedang memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut : Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu, Sebelah Selatan : Kabupaten Garut, Sebelah Barat : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang, Sebelah Timur : Kabupaten Majalengka.

Penduduk Sumedang cukup beragam dilihat agama dan etnis yang menunjukkan hetrogennya penduduk Sumedang karena selain warga etnis sunda asli, warga keturunan asing dan warga etnis lain dari seluruh Indonesia. Kegiatan-kegiatan sosial seperti pengajian rutin, kegiatan posyandu di semua RW, dan arisan hampir di setiap RT walaupun terbatas pada pengurus-pengurus inti, serta kelompok-kelompok kesenian dan olahraga. Kemegahan Sumedang hanya terlihat di pinggir-pinggir jalan umum, namun bila di telusuri ke semua sudut Sumedang terdapat kesenjangan antara penduduk kelas atas dengan para penduduk kelas bawah yag bekerja disektor informal sebagai kelompok sasaran dalam penelitian ini. Secara umum gangguan keamanan seperti perkelahian dan pencurian jarang

terjadi di Sumedang. Berdasarkan paparan ini penulis bermaksud untuk melihat bagaimana sumber/potensi dari sisi sumberdaya manusia maupun sumberdaya/potensi lainnya yang dapat dimanfaatkan guna memperbaiki kualitas kehidupan manusia serta keberlangsungan mahluk hidup lainnya di Sumedang.

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Tabel 1: Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur danJenis Kelamin Sumedang tahun 2011

No	Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		L	P		
1	0 - 5 t	384	387	771	3,02
2	6 - 10	1.180	1.182	2.362	9,27
3	11 - 20	1.976	1.977	3.953	15,51
4	21 - 35	1.949	1.947	3.896	15,28
5	36 - 50	2.686	2.689	5.375	21,17
6	51 - 60	2.078	2.079	4.157	16,31
7	61	2.478	2.479	4.957	19,44
	Jumlah	**12.731**	**12.740**	**25. 471**	**100,00**

Sumber: Sumedang , 2011

Tabel 1 menunjukkan bahwa, penduduk Sumedang berdasarkan jenis kelamin perempuan dan laki-laki selisihnya tidak jauh berbeda, dimana terlihat penduduk jenis kelamin perempuan berjumlah 12.740 atau 50,01 persen orang dan penduduk laki-laki berjumlah 12.731 atau 48.99 persen orang. Jumlah tersebut merupakan salah satu potensi yang dapat digerakkan guna meningkatkan pembangunan kesejahteraan sosial, karena manusia